

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP DINAMIKA INFLASI DI INDONESIA

Mutia Hasan PA¹, Budi Abdullah², Tasya Ramadhani³, Nayla Syarifah Rangkuti⁴, Marsha Yolanda Chairizqa⁵

¹⁻⁵ Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum,
Institut Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

Email: Mhn2364@gmail.com

ABSTRACT

Inflation is a macroeconomic indicator that significantly determines a country's economic stability. In Indonesia, inflation dynamics are influenced by various factors, including fiscal and monetary policies implemented by the government and Bank Indonesia. This study aims to analyze the impact of fiscal and monetary policies on inflation dynamics in Indonesia using a qualitative approach. The research method used is a literature study utilizing secondary data in the form of official government reports, Bank Indonesia publications, data from the Central Bureau of Statistics, and relevant macroeconomic journals and books. Data analysis techniques were descriptive-analytical through content analysis of related policies and literature. The results of the study indicate that fiscal and monetary policies have a strategic role in controlling inflation, both directly and indirectly. Synergy between fiscal and monetary policies is key to maintaining inflation stability and the national economy.

Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Inflation, Macroeconomics, Indonesia.

ABSTRAK

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang sangat menentukan stabilitas perekonomian suatu negara. Di Indonesia, dinamika inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap dinamika inflasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan resmi pemerintah, publikasi Bank Indonesia, data Badan Pusat Statistik, serta jurnal dan buku ekonomi makro yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui analisis isi terhadap kebijakan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi dan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Inflasi, Ekonomi Makro, Indonesia.

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 80

Prefix DOI:

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[commons attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[noncommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Inflasi merupakan persoalan ekonomi makro yang secara langsung memengaruhi stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus tidak hanya berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Sebagai negara berkembang dengan struktur perekonomian yang dinamis, Indonesia kerap menghadapi fluktuasi inflasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memegang peranan penting dalam mengelola stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga. Sementara itu, kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai mata uang guna menekan laju inflasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal dan moneter tidak selalu berjalan secara optimal dan selaras. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif sering kali diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan tekanan inflasi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat. Di sisi lain, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat menekan inflasi, namun berisiko menghambat aktivitas ekonomi dan investasi. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema kebijakan yang perlu dikaji secara mendalam.

Berbagai kebijakan fiskal dan moneter telah diterapkan di Indonesia dalam merespons dinamika ekonomi, baik pada kondisi normal maupun pada masa ketidakpastian ekonomi. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut dalam memengaruhi dinamika inflasi tidak hanya ditentukan oleh instrumen yang digunakan, melainkan juga oleh konteks dan koordinasi kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, kajian yang menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap dinamika inflasi di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan, khususnya melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis kebijakan dan kerangka teoretis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan moneter memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam pengendalian inflasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap kebijakan fiskal dan moneter serta dampaknya terhadap inflasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi merupakan salah satu konsep paling penting dalam analisis ekonomi makro karena mencerminkan tingkat stabilitas harga dan keseimbangan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, inflasi tidak hanya dipahami sebagai fenomena moneter yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar, tetapi juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan karakteristik perekonomian nasional. Ketergantungan terhadap impor bahan baku dan pangan, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah menyebabkan pergerakan harga di Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal dan internal (Warjiyo dan Juhro, 2020). Selain itu, struktur konsumsi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh kebutuhan dasar menjadikan inflasi memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai inflasi di Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik yang komprehensif dan tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi (Siregar dan Wardhono, 2021).

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama negara dalam memengaruhi dinamika inflasi melalui pengelolaan belanja dan pendapatan negara. Belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada saat yang sama juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi apabila pertumbuhan permintaan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi nasional (Putri dan Hakim, 2022). Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia kerap menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat stabilisasi harga, khususnya melalui pemberian subsidi energi, subsidi pangan, dan bantuan sosial. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menahan kenaikan harga dan melindungi daya beli masyarakat, terutama pada saat terjadi gejolak harga global. Meskipun demikian, kebijakan fiskal juga menghadapi keterbatasan berupa ruang fiskal dan keberlanjutan anggaran, sehingga perumusannya harus mempertimbangkan dampak jangka menengah terhadap stabilitas ekonomi dan inflasi (Nugroho dan Astuti, 2022).

Selain belanja negara, kebijakan fiskal juga memengaruhi inflasi melalui instrumen perpajakan. Pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai, memiliki hubungan langsung dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perubahan tarif pajak dapat meningkatkan biaya produksi dan harga jual, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan inflasi, terutama pada sektor-sektor yang memiliki elastisitas permintaan yang rendah dan berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok (Prasetyo dan Lestari, 2023). Oleh karena itu, kebijakan perpajakan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian ekonomi yang memiliki implikasi luas terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan pajak menjadi sangat penting agar tujuan fiskal tidak bertentangan dengan upaya pengendalian inflasi.

Kebijakan moneter merupakan instrumen utama dalam menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan inflasi dari sisi moneter. Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter dengan tujuan menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dalam kerangka kebijakan penargetan inflasi, pengaturan suku bunga acuan digunakan untuk memengaruhi ekspektasi inflasi dan perilaku konsumsi serta investasi masyarakat (Bank Indonesia, 2023). Namun demikian, efektivitas kebijakan moneter di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, seperti dominasi sektor informal, rendahnya tingkat inklusi keuangan, serta ketergantungan terhadap sektor komoditas. Kondisi tersebut menyebabkan transmisi kebijakan moneter terhadap sektor riil dan inflasi tidak selalu berjalan secara cepat dan merata (Setiawan et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan moneter memerlukan dukungan kebijakan lain agar dapat berfungsi secara optimal.

Sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter menjadi prasyarat utama dalam menjaga stabilitas inflasi di Indonesia. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif tanpa diimbangi oleh kebijakan moneter yang tepat berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, sementara kebijakan moneter yang terlalu ketat tanpa dukungan fiskal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Hidayat dan Kurniawan, 2023). Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi elemen kunci dalam perumusan kebijakan ekonomi makro yang

berkelanjutan. Secara yuridis, pelaksanaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23 ayat (1) mengenai pengelolaan keuangan negara dan Pasal 23D mengenai kedudukan bank sentral. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, 2020; Warjiyo, 2021).

Selain koordinasi di tingkat nasional, pengendalian inflasi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan di tingkat daerah. Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan bentuk konkret sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. TPID berperan dalam menjaga kelancaran distribusi barang, mengawasi ketersediaan pasokan, serta melakukan langkah-langkah preventif terhadap lonjakan harga yang bersifat musiman. Keberadaan TPID menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan instrumen moneter dan fiskal di tingkat makro, tetapi juga memerlukan pendekatan mikro dan kelembagaan yang kuat di tingkat daerah (Lestari & Ramadhan, 2024).

Inflasi di Indonesia juga memiliki dimensi ekspektasi yang sangat kuat. Ekspektasi inflasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh persepsi terhadap kebijakan pemerintah, stabilitas politik, serta kondisi ekonomi global. Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan (policy communication) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas inflasi. Bank Indonesia secara aktif melakukan komunikasi kebijakan melalui publikasi laporan, pernyataan resmi, dan edukasi publik guna membentuk ekspektasi inflasi yang rasional. Kebijakan fiskal pun perlu dikomunikasikan secara transparan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami arah kebijakan pemerintah, sehingga dapat meminimalkan reaksi berlebihan yang berpotensi mendorong inflasi (Pratama & Wibowo, 2021).

Dari perspektif ekonomi syariah, pengendalian inflasi memiliki relevansi yang erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dan merugikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga semata, tetapi juga pada perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan pemerataan kesejahteraan. Instrumen fiskal seperti subsidi, bantuan sosial, dan belanja publik yang pro-rakyat dapat dipandang sebagai upaya negara dalam menjalankan fungsi keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan nilai-nilai syariah (Rahman et al., 2023).

Lebih lanjut, tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi internasional, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan moneter global turut memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia. Kondisi ini menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas kebijakan fiskal dan moneter agar tetap efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dalam situasi tertentu, kebijakan yang bersifat counter-cyclical menjadi penting untuk meredam dampak eksternal terhadap inflasi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus dirancang secara komplementer dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global tanpa mengabaikan kondisi struktural perekonomian nasional (Warjiyo & Juhro, 2020).

Dalam praktiknya, efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mengendalikan inflasi sangat ditentukan oleh waktu (timing) dan skala kebijakan yang diterapkan. Kebijakan yang secara teoritis tepat dapat menjadi kurang efektif apabila diterapkan terlambat atau dalam skala yang tidak proporsional dengan tekanan inflasi yang terjadi. Misalnya, keterlambatan pemerintah dalam merespons kenaikan harga komoditas global dapat menyebabkan inflasi impor (imported inflation) yang sulit dikendalikan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kecepatan respons kebijakan menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas harga di Indonesia.

Selain itu, struktur pasar domestik juga turut memengaruhi dinamika inflasi. Pasar yang bersifat oligopolistik, khususnya pada sektor pangan dan energi, berpotensi memperkuat

tekanan inflasi akibat adanya kekuatan penetapan harga oleh pelaku usaha tertentu. Dalam kondisi demikian, kebijakan moneter yang berfokus pada pengendalian uang beredar sering kali tidak cukup efektif jika tidak disertai dengan kebijakan fiskal dan regulasi pasar yang mendukung. Pemerintah perlu memastikan adanya persaingan usaha yang sehat serta pengawasan distribusi barang agar inflasi tidak dipicu oleh faktor non-moneter yang bersifat struktural.

Di sisi lain, kebijakan fiskal juga berperan penting dalam menjaga stabilitas inflasi melalui pengelolaan defisit anggaran. Defisit anggaran yang terlalu besar dan tidak dikelola secara hati-hati berpotensi meningkatkan pembiayaan utang, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan tekanan inflasi. Namun demikian, defisit anggaran yang terukur dan diarahkan pada sektor-sektor produktif justru dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional dan meredam tekanan inflasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dalam konteks kebijakan moneter, transmisi suku bunga terhadap inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pelaku ekonomi. Apabila dunia usaha dan masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas moneter, maka perubahan suku bunga acuan akan lebih cepat memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menyebabkan kebijakan moneter kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, independensi Bank Indonesia dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas kebijakan moneter di mata publik.

Lebih jauh, pengendalian inflasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan kapasitas produksi nasional. Inflasi yang bersumber dari sisi penawaran (*cost-push inflation*), seperti kenaikan harga energi, bahan baku, dan upah, memerlukan respons kebijakan yang berbeda dibandingkan inflasi yang bersumber dari sisi permintaan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal memiliki peran strategis melalui investasi pemerintah di bidang infrastruktur, pertanian, dan industri pengolahan. Peningkatan kapasitas produksi tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga dalam jangka menengah hingga panjang.

Dari sudut pandang hukum ekonomi, pengendalian inflasi juga berkaitan erat dengan kepastian hukum dan kualitas regulasi. Kebijakan fiskal dan moneter yang didukung oleh regulasi yang jelas, konsisten, dan berkeadilan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan investor, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan tanpa memicu tekanan inflasi yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas inflasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan dan sistem hukum yang efektif.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi juga turut memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia. Digitalisasi sistem pembayaran, pertumbuhan e-commerce, serta meningkatnya penggunaan instrumen keuangan digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Di satu sisi, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan biaya transaksi sehingga berpotensi meredam tekanan inflasi. Namun di sisi lain, kemudahan akses konsumsi juga dapat mendorong peningkatan permintaan secara cepat, yang apabila tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai dapat memicu tekanan inflasi dari sisi permintaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter perlu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital agar tetap relevan dan efektif.

Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengendali inflasi melalui instrumen suku bunga, tetapi juga sebagai otoritas yang menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan memiliki keterkaitan erat dengan inflasi, karena gangguan pada sektor keuangan dapat menghambat penyaluran kredit dan mengganggu aktivitas ekonomi riil. Oleh karena itu, kebijakan moneter di Indonesia semakin mengarah pada pendekatan bauran kebijakan (*policy mix*), yang mengombinasikan instrumen suku bunga,

makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

Sementara itu, kebijakan fiskal dalam pengendalian inflasi juga tidak terlepas dari aspek keberlanjutan sosial. Program bantuan sosial dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) terhadap dampak inflasi, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Meskipun kebijakan ini tidak secara langsung menurunkan inflasi, namun mampu mengurangi dampak negatif inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari stabilitas harga semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keadilan sosial dan stabilitas sosial.

Lebih lanjut, dinamika inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksogen seperti perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global. Fenomena cuaca ekstrem dapat mengganggu produksi pangan dan distribusi, sehingga memicu inflasi pangan yang bersifat temporer namun berdampak luas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan fiskal dan moneter perlu dilengkapi dengan kebijakan sektoral yang mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Diversifikasi sumber pangan, penguatan cadangan strategis, serta peningkatan logistik nasional menjadi langkah penting dalam memitigasi risiko inflasi yang bersumber dari faktor non-ekonomi.

Dari perspektif kelembagaan, keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi. Tidak adanya koordinasi yang efektif dapat menyebabkan kebijakan yang saling bertentangan dan mengurangi efektivitas pengendalian inflasi. Oleh karena itu, forum koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait menjadi sarana penting dalam menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral. Koordinasi tersebut mencerminkan pendekatan tata kelola ekonomi yang terintegrasi dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, stabilitas inflasi juga berkaitan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menggerus nilai harta masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, peran negara dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan normatif yang kuat.

Dalam dinamika kebijakan ekonomi makro, stabilitas inflasi juga berkaitan erat dengan kredibilitas kebijakan pemerintah dan otoritas moneter. Kredibilitas ini tercermin dari konsistensi kebijakan yang dijalankan serta kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Kebijakan fiskal dan moneter yang sering berubah tanpa landasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, sehingga memicu ekspektasi inflasi yang berlebihan. Oleh karena itu, kepastian arah kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan kepercayaan pelaku ekonomi.

Lebih lanjut, inflasi di Indonesia juga memiliki dimensi distribusional yang perlu diperhatikan. Dampak inflasi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah cenderung lebih rentan terhadap kenaikan harga karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen korektif untuk mengurangi dampak inflasi melalui program subsidi, bantuan langsung, dan pengendalian harga barang strategis. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga pada perlindungan sosial.

Di sisi lain, kebijakan moneter menghadapi tantangan dalam mengendalikan inflasi yang bersumber dari faktor non-moneter, seperti gangguan pasokan dan kenaikan harga komoditas global. Instrumen moneter seperti suku bunga memiliki keterbatasan dalam merespons inflasi jenis ini. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan menjadi semakin penting agar kebijakan

moneter tidak bekerja sendiri dalam menghadapi tekanan inflasi. Sinergi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral memungkinkan respons yang lebih komprehensif dan efektif terhadap berbagai sumber inflasi.

Pengalaman Indonesia dalam menghadapi tekanan inflasi juga menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang bersifat antisipatif. Kebijakan yang hanya bersifat reaktif cenderung kurang efektif dalam jangka panjang. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi tekanan inflasi, baik yang bersumber dari faktor domestik maupun global. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter dapat dirancang secara lebih preventif dan terukur.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peran negara dalam mengendalikan inflasi sejalan dengan konsep *hisbah*, yaitu pengawasan negara terhadap aktivitas ekonomi untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang dan spekulasi berlebihan. Inflasi yang disebabkan oleh distorsi pasar dan ketidakadilan ekonomi bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, intervensi negara melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pasar dapat dibenarkan secara normatif sebagai upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, stabilitas inflasi juga berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Inflasi yang terkendali menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menghambat investasi, menurunkan daya saing ekonomi, dan memperlebar kesenjangan sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dalam mengendalikan inflasi merupakan prasyarat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika inflasi di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, faktor struktural, serta kondisi global. Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, berlandaskan hukum, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan publik.

1. Bagaimana Kebijakan Fiskal Memengaruhi Dinamika Inflasi di Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam konteks stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam memengaruhi tingkat inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inflasi sebagai fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor moneter, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Di Indonesia, karakteristik inflasi yang cenderung dipengaruhi oleh faktor struktural, pangan, dan energi menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen yang sangat krusial dalam pengendalian inflasi.

Secara teoretis, hubungan antara kebijakan fiskal dan inflasi dapat dijelaskan melalui pendekatan permintaan agregat. Ketika pemerintah meningkatkan belanja negara tanpa diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi, maka permintaan agregat akan meningkat melebihi kemampuan penawaran agregat. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga inflasi menjadi tidak terhindarkan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal ekspansif sering diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kebijakan ini juga membawa konsekuensi berupa tekanan inflasi apabila tidak dikelola secara hati-hati dan terukur.

Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen utama kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika inflasi. Peningkatan belanja negara, terutama

pada sektor konsumtif seperti bantuan sosial, subsidi, dan belanja pegawai, dapat meningkatkan daya beli masyarakat secara langsung. Peningkatan daya beli ini mendorong konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Apabila peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, maka tekanan inflasi akan semakin kuat. Fenomena ini sering terlihat pada periode tertentu, seperti menjelang hari besar keagamaan, ketika belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat meningkat secara bersamaan.

Selain belanja pemerintah, kebijakan perpajakan juga memiliki peran penting dalam memengaruhi inflasi. Pajak merupakan instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mengendalikan permintaan agregat. Peningkatan tarif pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung, cenderung menurunkan daya beli masyarakat sehingga dapat menekan laju inflasi. Sebaliknya, penurunan tarif pajak atau pemberian insentif pajak dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, yang pada kondisi tertentu dapat mendorong inflasi. Di Indonesia, kebijakan pajak sering digunakan sebagai alat stimulus ekonomi, khususnya dalam menghadapi perlambatan ekonomi atau krisis. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan pengawasan inflasi agar tidak menimbulkan tekanan harga yang berlebihan.

Kebijakan subsidi merupakan aspek penting lainnya dari kebijakan fiskal yang sangat berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Subsidi, terutama subsidi energi dan pangan, berperan sebagai alat stabilisasi harga yang efektif dalam jangka pendek. Pemerintah Indonesia secara historis menggunakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan beberapa komoditas pangan strategis untuk menahan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Penyesuaian atau pengurangan subsidi sering kali berdampak langsung terhadap tingkat inflasi, karena kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang secara luas. Oleh karena itu, kebijakan fiskal terkait subsidi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap stabilitas harga di Indonesia.

Kebijakan fiskal juga memengaruhi inflasi melalui pengelolaan defisit anggaran. Defisit anggaran yang tinggi dan dibiayai melalui utang atau pembiayaan moneter dapat meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian, yang pada akhirnya mendorong inflasi. Pemerintah Indonesia secara normatif berupaya menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman guna menghindari tekanan inflasi dan menjaga kepercayaan pasar. Pengelolaan defisit yang prudent menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas harga.

Dalam perspektif jangka panjang, efektivitas kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi juga ditentukan oleh kualitas belanja negara. Belanja yang diarahkan pada sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, cenderung meningkatkan kapasitas produksi nasional. Peningkatan kapasitas produksi ini dapat mengimbangi peningkatan permintaan agregat, sehingga tekanan inflasi dapat diminimalkan. Sebaliknya, belanja yang tidak produktif dan kurang tepat sasaran berpotensi memperbesar tekanan inflasi tanpa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan fiskal juga memiliki peran penting dalam membentuk ekspektasi inflasi masyarakat. Ekspektasi inflasi merupakan faktor psikologis yang memengaruhi perilaku konsumsi, investasi, dan penetapan harga oleh pelaku ekonomi. Ketika pemerintah mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga disiplin fiskal, transparansi anggaran, serta konsistensi kebijakan, maka kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi akan meningkat. Ekspektasi inflasi yang terkendali akan membantu menahan kenaikan harga, karena pelaku usaha tidak terdorong untuk menaikkan harga secara berlebihan sebagai langkah antisipatif.

Dalam konteks Indonesia, pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasinya dengan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa dukungan kebijakan moneter yang tepat berpotensi memperbesar tekanan inflasi. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter

menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan saling melengkapi dan tidak saling meniadakan dampaknya.

Dinamika inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global dan nilai tukar. Dalam kondisi ini, kebijakan fiskal berperan sebagai alat mitigasi untuk meredam dampak eksternal tersebut terhadap perekonomian domestik. Misalnya, ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan subsidi atau memberikan kompensasi kepada kelompok rentan untuk menahan dampak inflasi. Namun, kebijakan ini perlu dirancang secara hati-hati agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia. Melalui pengelolaan belanja negara, kebijakan perpajakan, subsidi, serta pengendalian defisit anggaran, pemerintah dapat memengaruhi tingkat permintaan agregat, struktur biaya produksi, dan ekspektasi inflasi masyarakat. Efektivitas kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi sangat bergantung pada ketepatan desain kebijakan, waktu implementasi, serta koordinasi yang baik dengan kebijakan moneter. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang kredibel, disiplin, dan berorientasi jangka panjang menjadi prasyarat utama dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

2. Bagaimana kebijakan moneter memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia

Kebijakan moneter merupakan instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi. Di Indonesia, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Stabilitas tersebut tidak hanya mencakup stabilitas nilai tukar, tetapi juga stabilitas harga barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan investasi, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Dalam perspektif teori ekonomi makro, inflasi erat kaitannya dengan kondisi moneter suatu negara, khususnya jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Pandangan monetaris menegaskan bahwa inflasi pada dasarnya merupakan fenomena moneter yang muncul ketika pertumbuhan jumlah uang beredar melampaui pertumbuhan output riil. Oleh karena itu, kebijakan moneter berfungsi sebagai alat pengendalian likuiditas agar selaras dengan kapasitas produksi nasional. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan struktur ekonomi yang terbuka, dinamika inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh tekanan eksternal seperti volatilitas nilai tukar, arus modal global, dan fluktuasi harga komoditas internasional.

Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter berbasis *Inflation Targeting Framework* (ITF), di mana sasaran inflasi diumumkan secara eksplisit sebagai jangkar utama kebijakan. Kerangka ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas bank sentral serta membentuk ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap terkendali. Dalam praktiknya, ITF dijalankan melalui pengaturan suku bunga kebijakan yang saat ini dikenal sebagai BI 7-Day *Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Suku bunga ini berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter yang memengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga perbankan, serta keputusan konsumsi dan investasi pelaku ekonomi.

Perubahan suku bunga kebijakan memiliki implikasi langsung terhadap permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika Bank Indonesia menaikkan BI7DRR sebagai respons terhadap tekanan inflasi, biaya pinjaman akan meningkat sehingga konsumsi rumah tangga dan investasi swasta cenderung menurun. Penurunan permintaan agregat ini pada akhirnya akan menekan tekanan harga dan membantu menurunkan inflasi. Sebaliknya, dalam kondisi perlambatan ekonomi atau inflasi yang rendah, penurunan suku bunga kebijakan bertujuan untuk mendorong

ekspansi kredit dan meningkatkan aktivitas ekonomi, meskipun berpotensi meningkatkan tekanan inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi.

Selain melalui suku bunga, kebijakan moneter juga memengaruhi inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar dan likuiditas di pasar keuangan. Bank Indonesia secara aktif melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual surat berharga negara untuk mengatur likuiditas perbankan. Ketika inflasi cenderung meningkat, kebijakan pengetatan likuiditas dilakukan untuk menyerap kelebihan uang beredar, sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan dapat dikendalikan. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang lesu, pelonggaran likuiditas dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi.

Efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi inflasi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi ini menjelaskan bagaimana perubahan instrumen moneter diteruskan ke sektor riil dan akhirnya memengaruhi tingkat harga. Beberapa jalur transmisi utama yang relevan di Indonesia meliputi jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi inflasi. Jalur suku bunga bekerja melalui perubahan biaya pinjaman, sementara jalur kredit memengaruhi inflasi melalui perubahan volume pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan kepada sektor produktif dan konsumtif.

Jalur nilai tukar memiliki peranan yang sangat penting dalam dinamika inflasi Indonesia mengingat tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku, barang modal, dan energi. Kebijakan moneter yang ketat cenderung menarik arus modal masuk dan memperkuat nilai tukar rupiah. Penguatan rupiah dapat menurunkan harga barang impor dan meredam tekanan inflasi impor (*imported inflation*). Sebaliknya, depresiasi nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan mendorong kenaikan harga domestik, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada input impor.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peran ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten untuk membentuk ekspektasi inflasi yang rasional. Ketika pelaku usaha dan rumah tangga memiliki keyakinan bahwa inflasi akan tetap berada dalam kisaran target, perilaku penetapan harga dan upah cenderung lebih terkendali. Dengan demikian, pengelolaan ekspektasi inflasi menjadi instrumen tidak langsung namun sangat efektif dalam menjaga stabilitas harga.

Berbagai penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Studi-studi tersebut menemukan bahwa suku bunga kebijakan Bank Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi dalam jangka panjang, meskipun efeknya seringkali mengalami keterlambatan waktu (*policy lag*). Selain itu, variabel moneter lain seperti jumlah uang beredar dan nilai tukar juga terbukti berperan penting dalam menjelaskan dinamika inflasi nasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan moneter seringkali menghadapi keterbatasan ketika inflasi dipicu oleh faktor penawaran, seperti kenaikan harga pangan akibat gangguan produksi atau lonjakan harga energi global.

Oleh karena itu, kebijakan moneter tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral lainnya. Dalam konteks Indonesia, sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi elemen kunci dalam pengendalian inflasi, terutama melalui koordinasi pengendalian harga pangan dan energi. Koordinasi tersebut diwujudkan dalam berbagai forum kebijakan, seperti Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter memainkan peran strategis dalam memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia melalui pengaturan suku bunga, pengendalian likuiditas, stabilisasi nilai tukar, dan pembentukan ekspektasi inflasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural dan eksternal, kebijakan moneter yang kredibel, transparan, dan terkoordinasi

dengan kebijakan ekonomi lainnya tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Bagaimana hubungan dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam pengendalian inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan fenomena makroekonomi yang memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, serta keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan domestik, tetapi juga oleh faktor struktural, ekspektasi inflasi, serta guncangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global dan nilai tukar. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hubungan dan koordinasi antara kedua kebijakan tersebut menjadi prasyarat penting dalam menjaga stabilitas harga secara efektif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memengaruhi dinamika inflasi. Kebijakan fiskal, melalui instrumen belanja negara, perpajakan, dan pembiayaan defisit, memengaruhi inflasi terutama dari sisi permintaan agregat. Peningkatan belanja pemerintah, khususnya belanja konsumtif, cenderung meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga apabila tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi. Sebaliknya, kebijakan moneter bekerja melalui pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan ekspektasi inflasi dengan tujuan utama menjaga stabilitas nilai mata uang dan tingkat harga.

Dalam praktiknya, hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter bersifat interdependen. Kebijakan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan tekanan inflasi sehingga memaksa otoritas moneter untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah, mempersempit ruang fiskal, serta menghambat efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting untuk menghindari konflik kebijakan (*policy conflict*) yang dapat menurunkan efektivitas pengendalian inflasi.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia dengan kerangka *inflation targeting framework* (ITF), di mana stabilitas harga ditetapkan sebagai tujuan utama. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan, seperti penetapan suku bunga acuan (BI-Rate atau BI 7-Day Reverse Repo Rate), operasi pasar terbuka, serta pengaturan likuiditas perbankan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kebijakan fiskal berada di bawah kewenangan pemerintah melalui pengelolaan APBN, dengan tujuan tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan perlindungan sosial.

Karakteristik inflasi yang cenderung dipengaruhi oleh faktor struktural dan supply Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia menjadi semakin relevan mengingat *-side shocks*, terutama inflasi pangan dan energi. Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter saja sering kali kurang efektif karena kenaikan suku bunga tidak secara langsung menurunkan harga pangan atau memperbaiki gangguan distribusi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal berperan penting melalui subsidi, pengendalian harga, serta intervensi pasar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok.

Secara kelembagaan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia diperkuat melalui berbagai forum formal dan informal. Salah satu bentuk koordinasi yang paling menonjol adalah pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta lembaga terkait lainnya dapat menyusun strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi, khususnya dalam mengendalikan inflasi pangan yang bersifat *volatile*. Koordinasi ini mencakup aspek

perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pengendalian inflasi secara komprehensif.

Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga tercermin dalam pengelolaan pembiayaan defisit anggaran. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga defisit anggaran dalam batas yang kredibel untuk menghindari tekanan inflasi yang berlebihan. Disiplin fiskal yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar dan membantu Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. Sebaliknya, pembiayaan defisit yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan risiko *fiscal dominance*, di mana kebijakan moneter menjadi kurang independen karena harus mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Pengalaman Indonesia selama periode krisis, termasuk krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, menunjukkan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas inflasi. Dalam kondisi krisis, pemerintah cenderung menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menopang perekonomian, sementara Bank Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan moneter yang akomodatif. Namun demikian, koordinasi tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan inflasi di kemudian hari. Oleh karena itu, exit strategy yang jelas dan komunikasi kebijakan yang transparan menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan makroekonomi.

Dari sisi empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia berkontribusi positif terhadap stabilitas inflasi. Kebijakan fiskal yang kredibel dan berorientasi pada stabilitas jangka menengah dapat mengurangi beban kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak perlu menerapkan kebijakan moneter yang terlalu ketat yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Sebaliknya, kebijakan moneter yang konsisten dan transparan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia masih cukup signifikan. Tekanan politik dalam penetapan belanja dan subsidi, keterbatasan ruang fiskal, serta ketidakpastian ekonomi global dapat mengganggu sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perbedaan horizon waktu antara kebijakan fiskal yang cenderung berjangka pendek dan kebijakan moneter yang berorientasi jangka menengah juga dapat menimbulkan potensi ketidaksinkronan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga konsistensi kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Dalam jangka panjang, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan, bukan sekadar kuantitas stimulus. Kebijakan fiskal perlu difokuskan pada belanja produktif yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan tekanan inflasi struktural, seperti investasi infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan sistem logistik. Sementara itu, kebijakan moneter perlu terus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan melalui penguatan sektor keuangan dan peningkatan inklusi keuangan.

Secara keseluruhan, hubungan dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter merupakan fondasi utama dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Sinergi yang efektif antara kedua kebijakan tersebut tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan domestik dan global.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa inflasi di Indonesia merupakan fenomena ekonomi yang bersifat multidimensional dan

tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan moneter semata. Dinamika inflasi dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, faktor struktural perekonomian, ekspektasi masyarakat, serta guncangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi internasional. Karakteristik perekonomian Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi, ketergantungan impor, serta disparitas antarwilayah menjadikan pengendalian inflasi sebagai tantangan yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal terbukti memiliki peran strategis dalam memengaruhi inflasi melalui pengelolaan belanja negara, kebijakan perpajakan, subsidi, dan pengendalian defisit anggaran. Kebijakan fiskal yang ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, namun berpotensi meningkatkan tekanan inflasi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dan disiplin fiskal yang kuat. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang kredibel, tepat sasaran, dan berorientasi pada sektor produktif mampu meredam tekanan inflasi sekaligus mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia melalui kerangka inflation targeting framework memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas harga melalui pengaturan suku bunga, pengendalian likuiditas, stabilisasi nilai tukar, serta pembentukan ekspektasi inflasi yang rasional. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan moneter di Indonesia menghadapi keterbatasan, terutama ketika inflasi bersumber dari sisi penawaran dan faktor struktural. Oleh karena itu, kebijakan moneter tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral lainnya.

Sinergi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter menjadi prasyarat utama dalam pengendalian inflasi yang efektif di Indonesia. Koordinasi yang baik mampu mencegah konflik kebijakan, meningkatkan kredibilitas otoritas ekonomi, serta memperkuat transmisi kebijakan terhadap sektor riil. Keberadaan forum koordinasi seperti Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa pengendalian inflasi memerlukan pendekatan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, tidak hanya pada level makro tetapi juga pada level mikro dan kelembagaan.

Dari perspektif hukum ekonomi dan ekonomi syariah, pengendalian inflasi memiliki dimensi normatif yang kuat karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Inflasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan menggerus nilai harta masyarakat, sehingga peran negara dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pasar dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan moral negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, pengendalian inflasi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial atau jangka pendek, melainkan harus ditempuh melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi, adaptif terhadap perubahan global, didukung oleh kepastian hukum, serta berorientasi pada keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter negara hukum kesejahteraan (welfare state) yang menempatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Rahmawati, S., & Sukmana, R. (2023). Fiscal-monetary policy coordination and inflation control in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 26(2), 145-168.
- Asshiddiqie, J. (2020). Konstitusi ekonomi dan kebijakan fiskal negara. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 245-260.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan kebijakan moneter Indonesia*. Bank Indonesia Review.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Bank Indonesia. (2024). Inflation targeting framework and monetary policy strategy in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 27(2), 155-176.
- Bank Indonesia. (2024). *Kerangka Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta.
- Hidayat, R., & Kurniawan, D. (2023). Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1), 45-60.
- Jamar, N., et al. (2025). Monetary policy transmission and inflation dynamics in Indonesia: Evidence from VECM approach. *RIGGS Journal of AI & Digital Business*, 3(1), 45-60.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN dan Stabilitas Ekonomi Makro*. Jakarta.
- Kementrian Keuangan RI. (2022). *Kebijakan fiskal dan pengendalian inflasi nasional*.
- Lestari, A., & Ramadhan, F. (2024). Peran TPID dalam pengendalian inflasi pangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 33-48.
- Lestari, A., & Ramadhan, F. (2024). Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi pangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 33-48.
- Mishkin, F. S. (2022). *The economics of money, banking, and financial markets* (13th ed.). Pearson Education.
- Nugroho, A., & Astuti, Y. (2022). Dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai terhadap inflasi konsumen di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara*, 14(3), 201-215.
- Prabowo, H., & Sari, M. (2022). Exchange rate volatility and inflation dynamics in emerging economies: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 67-81.
- Prasetyo, H., & Lestari, N. (2023). Pajak tidak langsung dan stabilitas harga kebutuhan pokok. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 10(2), 88-102.
- Prasetyo, P. E., & Kurniawan, D. (2023). Pengaruh belanja pemerintah terhadap inflasi dan pengendalian pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara*, 5(1), 45-62.
- Prasetyo, P. E., & Setyawan, D. (2024). Macroeconomic policy coordination and inflation dynamics in Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 85, 101558.
- Pratama, R., & Wibowo, T. (2021). Transmisi kebijakan suku bunga terhadap inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 23(4), 489-506.
- Pratama, R., & Wibowo, T. (2021). Transmisi kebijakan suku bunga terhadap inflasi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 23(4), 489-506.
- Putri, D. A., & Hakim, L. (2022). Belanja pemerintah dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2), 118-132.
- Putri, D. A., & Hakim, L. (2022). Pengaruh belanja pemerintah terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2), 118-132.
- Rahman, F., Susanto, H., & Dewi, M. (2023). Subsidi energi dan stabilitas inflasi. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(1), 55-70.
- Rahman, F., Susanto, H., & Dewi, M. (2023). Subsidi energi dan stabilitas inflasi dalam perspektif keadilan sosial. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(1), 55-70.
- Rahmatullah, D. (2024). Effectiveness of monetary policy in controlling inflation in Indonesia. *Jurnal Ekonomika*, 16(2), 112-128.
- Saragih, P. E., & Siregar, R. Y. (2024). Subsidi energy dan dampaknya terhadap inflasi Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(1), 23-40.
- Setiawan, B., Anwar, M., & Prakoso, R. (2024). Tantangan transmisi kebijakan moneter di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 16(1), 89-103.
- Setiawan, B., Anwar, M., & Prakoso, R. (2024). Tantangan transmisi kebijakan moneter di negara berkembang: Studi kasus Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 16(1), 89-103.
- Setiawan, R. Y., & Karsinah, K. (2023). Monetary policy transmission mechanism and inflation targeting in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(3), 289-302.
- Siregar, H., & Wardhono, A. (2021). *Ekonomi makro Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2022). *The economy of money, banking, and financial markets*.

- Warjiyo, P. (2021). Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 24(1), 1-18.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2020). Central bank policy mix and inflation control. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 22(4), 379-402.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2022). *Central bank policy: Theory and practice*. Bingley: Emerald Publishing.
- Widodo, T., & Lestari, E. (2023). Money supply, interest rate, and inflation in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(4), 512-528.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects*. Washington, DC.